

KOEKSISTENSI FUNGSI KELEMBAGAAN DALAM PEMANFAATAN SUMBER DAYA UNTUK MEWUJUDKAN DESA WISATA

(Studi Di Desa Karangdoro Kecamatan Tegalsari Banyuwangi)

Oleh:

I Made Suwitra¹, I Wayan Wesna Astara², AA Gede Oka Wisnumurti³,
I Ketut Kasta Aryawijaya⁴, Luh Kade Datrini⁵
Universitas Warmadewa Denpasar Bali Indonesia
Email address: madesuwitra27@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menggali dan menginventarisasi potensi desa untuk dikembangkan sebagai Daerah Tujuan Wisata (DTW) baru berbasis masyarakat dalam kemasan Desa Wisata dan dikelola secara melembaga dalam konsep koeksistensi. Melalui pola koeksistensi terhadap potensi spiritual dengan potensi sekuler akan diciptakan spirit keseimbangan dalam program pembangunan baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Penelitian ini menganalisis hak pengelolaan potensi desa terintegrasi dengan pemberdayaan masyarakat sebagai desa wisata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan, yaitu penelitian hukum empirik dengan pendekatan perundang-undangan, analitik, kasus, dan pendekatan antropologi hukum. Inovasi pengembangan DTW berbasis potensi desa seperti Pura Amertajati yang dikemas dalam desa wisata dapat berimplikasi pada pemeliharaan dan pelestarian sumber daya alam yang akan memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat secara berkelanjutan. Oleh karena itu sejak awal perlu dilakukan penguatan hubungan antar kelembagaan yang ada untuk menghindari persaingan seperti pengempon *Pura*, warung kuliner, parkir, *home stay*.

Kata Kunci: *Pura Amertajati*, desa wisata, karangdoro Banyuwangi, sumber daya.

1. Pendahuluan

1.1 Latar belakang masalah

Kegiatan ekonomi yang umumnya dikenal hanya mengejar keuntungan materiil, tidak selalu menyisihkan nilai sosial dan budaya, tetapi dapat pula digunakan untuk merangsang pembangunan sosial dan budaya yang sangat diperlukan untuk meningkatkan fungsi sumberdaya baik alam maupun manusianya. Melalui pepaduan tata ekonomi

alami dengan ekonomi binaan, akan diperoleh melalui kegiatan ekonomi dapat mempercepat meningkatkan kualitas dan kuantitas sumberdaya di segala bidang.

Tata alam yang indah, juga tidak terlepas dari ekosistem nilai sosial, ekonomi, dan budaya alamnya. Semuanya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan hidup manusia, dengan merekayasa agar tetap berdayaguna mengacu pada tata laksana pengendalian kualitas dan kuantitasnya. Desa

wisata secara konseptual diadopsi dari Nuryanti dalam makalah Konferensi internasional mengenai Pariwisata Budaya berjudul “*Concept, Perspective and Challenges*”. Dalam pengertian tersebut terdapat dua konsep yang utama dalam komponen desa wisata tahun 1993, yaitu:

1. **Penginapan:** sebagian dari tempat tinggal para penduduk setempat dan atau unit-unit yang berkembang atas konsep tempat tinggal penduduk.

2. **Atraksi:** seluruh kehidupan keseharian penduduk setempat beserta setting fisik lokasi desa yang memungkinkan berintegrasinya wisatawan sebagai partisipasi aktif seperti: kursus tari, bahasa dan lain-lain yang spesifik.

Edward Inskeep, dalam *Tourism Planning An Integrated and Sustainable Development Approach* mendefinisikan desa wisata sebagai berikut: *Village tourism, where small groups of tourist stay in or near traditional, often remote villages and learn about village life and the local environment*. Wisata pedesaan dimana sekelompok kecil wisatawan tinggal dalam atau dekat dengan suasana tradisional, sering di desa-desa yang terpencil dan belajar tentang kehidupan pedesaan dan lingkungan setempat.

Salah satu Desa di Kabupaten Klungkung Bali, yaitu Desa Pakseballi Kecamatan Dawan menjadi satu-satunya desa yang siap mengemban nama Desa Wisata dengan mendesain ulang Kali Unda sebagai Daerah Tujuan Wisata (DTW). Air permukaan yang melimpah mengalir Sungai yang dikenal

dengan Kali Unda telah dimanfaatkan sebagai salah satu DTW. Selain itu Desa Pakseballi kini telah merambah wisata agro dengan membuat jalur *traking* di perbukitan.

Pura Bukit Amerta memiliki potensi sumber mata air yang digunakan sebagai sumber air tirta (air suci) dan sumber air baku bagi masyarakat di Desa Karangdoro Banyuwangi, namun secara kasat mata kualitas air yang digunakan untuk beji dan mengalir ke penduduk memiliki kualitas yang berbeda, dimana terlihat agak keruh. Penyediaan air bersih juga belum sampai ke masing-masing rumah penduduk, baru sekitar 25% penduduk yang menikmati layanan air bersih sampai ke sambungan rumah dengan menggunakan bantuan selang. Kendala penyediaan air bersih yang dihadapi adalah finansial, institusional dan teknis.

Kuantitas air/debit air yang bersumber dari mata air yang berada di bawah pohon beringin putih melimpah, dibagi menjadi dua yaitu satu untuk air/tirta di *beji pura* yang dinyakinkan sebagai air suci, saat ini belum dikelola dengan baik sehingga banyak terbuang percuma. Kedua sebagai sumber air baku masyarakat yang dialirkan ke rumah-rumah penduduk yang berada di desa Karangdoro.

Dengan memperhatikan potensi yang ada dan juga pola pengelolaan yang dilakukan di daerah lain, maka Sumber Daya Alam, yaitu sumber air yang melimpah sangat memungkinkan untuk dikelola dan dimanfaatkan sebagai DTW berbasis Desa Wisata yang mengedepankan kearifan lokal.

Pengelolaan dan pemanfaatan mana dapat dilakukan secara terintegrasi oleh lembaga masyarakat dan dengan pemberdayaan berbagai potensi yang ada secara bersama-sama, seperti Pura Amertajati, lingkungan alam desa.

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan pada uraian tersebut di atas maka dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi potensi sumber daya alam yang terintegrasi di Desa Karangdoro sebagai persiapan dalam penetapan Desa Wisata?
2. Bagaimana pemanfaatan dan model pengelolaan potensi sumber daya air di Desa Karangdoro Banyuwangi sebagai Daerah Tujuan Wisata dalam wadah Desa Wisata berbasis kearifan lokal?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi ini adalah menemukan, menganalisis potensi sumber daya alam dalam wilayah desa yang dapat dikembangkan sebagai Daerah Tujuan Wisata terintegrasi. Selanjutnya menyusun kajian model pemanfaatan dan pengelolaan potensi sumber daya air sebagai Desa Wisata berbasis kearifan lokal.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini bermanfaat baik bagi masyarakat pendukung SDA terintegrasi, Pemerintah Desa, dan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Manfaat bagi masyarakat dan

Pemerintah Desa adalah meningkatkan mobilitas wisata ke Desa Karangdoro sehingga ada multiplayer efek terutama di bidang ekonomi masyarakat.

Bagi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian dalam penetapan Desa Wisata, dan menentukan urgensi dalam membangun infrastruktur terutama jalan desa untuk kesejahteraan masyarakat.

1.5. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan berupa penelitian hukum empiris, karena disinyalir adanya kesenjangan dalam pemanfaatan sumber daya agraria untuk mencapai kemakmuran yang sebesar-besarnya rakyat. Pendekatan masalah menggunakan pendekatan perundang-undangan, analitik, kasus, antropologi hukum. Kemudian Penelitian ini menggunakan sumber data dari sumber pertama baik dari informan maupun dari responden. Teknik penentuan Informannya didasarkan pada stratified random sampling, yaitu yang berdasarkan kedudukan atau jabatan tertentu seperti Kepala Dusun/Lingkungan, Kepala Desa/Lurah, Kepala Adat, Parisada, Pemuka Agama, Tokoh Adat/Agama. Sedangkan penentuan informannya didasarkan pada teknik sampling purposive, yaitu didasarkan pada ciri-ciri spesifik yang dimiliki responden. Selain itu juga digunakan data sekunder dalam bentuk bahan hukum baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Sedangkan lokasi penelitian di Karangdoro, adanya potensi pemanfaatan Sumber Daya

Agraria/Alam dalam bentuk air yang terintegrasi dengan tempat suci (Pura Amertajati), sebagai potensi luar biasa yang belum dikelola secara terintegrasi dan melembaga sesuai tuntutan peraturan perundangan, dan belum berdampak pada penetapan Desa Wisata.

1.6 Hasil dan Pembahasan

Dalam budaya baru masyarakat berkelanjutan ini, ekonomi yang dikembangkan dalam bioregion adalah ekonomi yang bertumpu dan bercirikan kondisi dan hukum alam setempat. *Edward Goldsmith, editor The Ecologist*, menyebut hukum ekonomi yang berlaku di sini adalah Hukum Ekodinamika, dengan mengambil inspirasi dari Hukum Termodinamika yang sudah dikenal umum.

Begitu pula yang terdapat di Desa Karang doro, Dusun Blokagung Kecamatan Tegalsari mengemong beberapa *Pura* sebagai tempat ibadah Umat Hindu. *Pura* yang dijadikan sebagai pusat penelitian dan sekaligus pengabdian masyarakat adalah *Pura Bukit Amerta* dengan *Beji* yang terletak di bawah *Pura* sebagai salah satu sumber air yang dijadikan air suci (*Tirta*) di beberapa *Pura* yang ada di Bayuwangi. Salah satunya adalah *Pura Bukit Amerta*. Sumber air *Beji* ini berasal dari Gunung yang disakralkan sejak dulu, bahkan sampai saat ini tempat *Beji* ini dipergunakan sebagai Pusat Kegiatan Lintas Agama, seperti Yoga, Meditasi dan kegiatan spiritual lainnya yang tujuannya untuk kesehatan dan kedamaian batin. Demikian

disampaikan oleh Romo Mangku (Sukajianto). *Beji* ini juga dimanfaatkan untuk pengobatan.

Dengan mendasarkan diri pada potensi alam ini, ekonomi bioregional justru bertujuan untuk mempertahankan kondisi alam setempat dalam keseimbangan alamiahnya dan bukan sebaliknya mengeksploitasi alam dengan menghancurkan atau. Menimbulkan gangguan dan kekacauan pada keseimbangan alamiahnya. Ekonomi seperti itu justru bekerja selaras dengan alam dengan menyesuaikan diri dengan prinsip-prinsip alam, dengan seluruh kondisi alamiahnya, dan bukannya mengubah apalagi menghancurkannya karena pada akhirnya ekonomi yang menghancurkan alam akan menghancurkan ekonomi itu sendiri. Kondisi ideal yang dikejar oleh ekonomi bioregional adalah kondisi keseimbangan, di mana terpenuhi kebutuhan ekonomi, terjaga keutuhan ekosistem dan terpelihara pola hidup dan budaya masyarakat setempat yang bersumber dari alam setempat. Singkatnya, ekonomi bioregional adalah ekonomi yang menyesuaikan seluruh aktivitasnya dengan kondisi dan potensi alam setempat untuk mewujudkan kesejahteraan penghuninya sambil tetap mempertahankan keseimbangan alamiah ekosistem setempat sebagaimana menjadi inti dari prinsip pembangunan berkelanjutan.

1.6.1 Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Non-Ekstraktif Sebagai Penunjang Desa Wisata

Penetapan sebuah desa sebagai desa wisata dilakukan melalui Peraturan

Bupati/Walikota atau melalui Peraturan Daerah. Dalam Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. 26 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pariwisata melalui Desa Wisata, dirumuskan, bahwa yang dimaksud desa wisata adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku.

Konsep desa wisata ini diadopsi dari Nuryanti dalam makalah Konferensi internasional mengenai Pariwisata Budaya berjudul “*Concept, Perspective and Challenges*”. Dalam pengertian tersebut terdapat dua konsep yang utama dalam komponen desa wisata tahun 1993, yaitu:

1. **Penginapan:** sebagian dari tempat tinggal para penduduk setempat dan atau unit-unit yang berkembang atas konsep tempat tinggal penduduk.

2. **Atraksi:** seluruh kehidupan keseharian penduduk setempat beserta setting fisik lokasi desa yang memungkinkan berintegrasinya wisatawan sebagai partisipasi aktif seperti: kursus tari, bahasa dan lain-lain yang spesifik.

Edward Inskeep, dalam *Tourism Planning An Integrated and Sustainable Development Approach* mendefinisikan desa wisata sebagai berikut: *Village tourism, where small groups of tourist stay in or near traditional, often remote villages and learn about village life and the local environment.*

Wisata pedesaan dimana sekelompok kecil wisatawan tinggal dalam atau dekat dengan suasana tradisional, sering di desa-desa yang terpencil dan belajar tentang kehidupan pedesaan dan lingkungan setempat.

Dalam membangun desa wisata, pemerintah mesti turun tangan. Pemerintah perlu menggandeng pelaku pariwisata seperti *guide, travel agent* untuk mencari keunikan sebuah desa sebelum menetapkannya sebagai desa wisata. Kedua harus berani memperbaiki infrastruktur. Keunikan ini penting untuk ada nilai jual yang ditawarkan kepada wisatawan. Selain itu keterlibatan pelaku pariwisata penting juga untuk turut mempromosikan keberadaan desa wisata tersebut. Tidak serta merta karena hubungan emosional menjadikan desa itu sebagai desa wisata. Ternyata desa itu belum siap sehingga dana yang turun, pemahaman mengenai desa wisata tidak didapat, akhirnya desa itu dianggap gagal menjadi desa wisata. Supaya tidak terjadi kegagalan, pemerintah harus melihat dulu secara detail mengenai potensi desa. Seperti Ubud di Gianyar Bali, dari dulu menjadi desa wisata karena senimannya, pelukisnya, alamnya yang masih dijaga, perdesaannya, serta keramahan masyarakatnya. Paling tidak harus ada pemahaman mengenai keuntungan ekonomi yang akan diterima oleh masyarakat, di desa wisata.

Denpasar dianggap sukses menransformasi objek wisata edukatif, yaitu dengan memanfaatkan Keberadaan Tukad Bindu sebagai destinasi wisata baru di Kota Denpasar yang berbasis partisipasi masyarakat

diapresiasi langsung oleh CEO Word Bank Kristalina Georgieve saat kunjungan ke Tukad Bindu. Pihaknya sangat bangga dan mendukung dan yakin, bahwa antusias masyarakat juga sangat berperan, terus berkontribusi positif untuk lingkungannya. Kepala Dinas Pariwisata Kota Denpasar (Dezire Mulyani) mengaku sangat senang Tukad Bindu dapat menjadi pilihan kunjungan CEO Word Bank dan delegasi lainnya. Ini menjadi implementasi *community base* yang menjadi komitmen Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Hal senada diungkapkan Pengelola sekaligus penggagas objek wisata Tukad Bindu (I Gst Ari Rai Temaja). Dengan adanya kunjungan CEO WB masyarakat sangat senang karena merasa diperhatikan dan berdampak positif pada motivasi masyarakat untuk terus bergerak mengembangkan potensi desa. Dengan adanya sumber air di Desa Karangdoro Banyuwangi dan terintegrasi dengan Pura Amerta Jati yang saat ini difungsikan sebagai Beji, tempat “penyucian” saat upacara iodalan di Pura Amerta Jati, juga sebagai sumber air minum bagi penduduknya, maka dicermati ada potensi untuk dimanfaatkan dan dikelola menjadi salah satu daerah tujuan wisata religi. Jadi sumber mata air di Desa Karangdoro merupakan salah satu **Sumber Daya Alam Non-Ekstraktif** yang dapat dimanfaatkan secara terintegrasi untuk dikelola secara profesional menjadi beberapa kegiatan, seperti sumber air suci (*Tirta*), air pengobatan, tempat *melukat* (membersihkan diri secara magis religius), tempat Yoga dan Meditasi sebagai referensi untuk mendukung penetapan

Desa Wisata. Demikian pula tempat-tempat suci lainnya disekitar Karangdoro seperti Pura Puncak Keratorn, Gubuk Kancil, Candi Penataran, Sapto Utomo di Dusun Sumber Timo yang dipercayai sebagai tempat Empu Baradah. Beji ini menjadi tempat Melasti pada saat perayaan menjelang hari Raya Nyepi. Demikian dijelaskan Romo Dalang (Saiman Suyanto).

16.2 Keberadaan BUMDes

Badan Usaha Milik Desa yang dikenal dengan nama BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat. Demikian ditegaskan dalam Pasal 1 angka 6 UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa. Jadi dalam upaya mengelola potensi atau aset Desa maka tidak dilaksanakan oleh Pemerintah Desa, tapi semua jenis usaha dapat dijalankan melalui BUMDes.

BUMDes di Kabupaten Klungkung Bali mulai berkembang. Berdasarkan data tahun 2016, jumlahnya mencapai 35 unit. Dari angka ini, BUMDes Pakseballi Kecamatan Dawan salah satu yang sudah mampu mengempakkan sayapnya. Melalui pembentukan sejumlah usaha, jumlah rumah tangga miskin (RTM) turun drastis. Ketua BUMDes Pakseballi (I Made Mustika) mengungkapkan, bahwa badan usaha ini dibentuk tahun 2014 yang kini memiliki 5 usaha: unit pengelolaan sampah, unit air, simpan pinjam, unit wisata,

pasar yang muncul bertahap. Usaha disesuaikan dengan potensi desa.

Dua tahun berdiri, usaha ini mampu memberikan angin segar untuk masyarakat. Melalui program simpan pinjam usaha kecil menengah (UKM) dan perindustrian seperti tenun, prada, klangсах dan ingka semakin berkembang. Keberadaannya juga mampu menyediakan lapangan pekerjaan, seperti pada unit pasar, buruh angkut yang dilakoni oleh warga yang dulu menganggur. Dampaknya sangat bagus untuk membangun desa. Tenaga kerja terserap, ekonomi bergerak, tegasnya. Menurut Perbekel Pakseball (Putu Ariadi), badan usaha di desanya yang memiliki 35 pegawai sangat strategis dalam mengentaskan kemiskinan. Pergerakan perekonomian secara berkelanjutan mampu memberikan ruang bagi Rumah Tangga Miskin. Untuk mencari penghasilan yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan. Tahun lalu angka kemiskinan 202 KK, sekarang tinggal 44. Ini salah satu dampak positif dari BUMdes. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB Klungkung (I wayan suteja) menyatakan, bahwa BUMDes Pakseball sudah berkembang dan mampu berkontribusi dalam percepatan pembangunan di desa. Untuk itu SDM di dalamnya harus terus dimaksimalkan melalui kegiatan pelatihan, secara rutin. Urusan permodalan langsung dari desa bersangkutan ditambah suntikan dari Pemerintah provinsi Bali, sedangkan dari Kabupaten masih nihil. Untuk modal ada yang mandiri.

Dengan ditetapkan Desa sebagai Desa Wisata, maka desa diharapkan mampu menggali potensi sumber daya sebagai salah satu daya Tarik wisata sehingga melalui peneanaan retribusi, parkir, rumah makan, souvenir dapat dikelola oleh masyarakat lokal sesuai dengan regulasi hukum negara dan hukum adat untuk kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian pengelolaan dan pemanfaatan SDA sebagai Daerah Tujuan Wisata dalam kemasan Desa Wisata terintegrasi memerlukan sebuah badan yang dimiliki oleh masyarakat desa. Badan inilah yang dikenal dengan BUMDes.

Ditengah lesunya penjualan barang-barang kerajinan di Pasar Seni Sukawati, Desa Wisata dijadikan terobosan oleh kabupaten Gianyar. Saat ini pembentukan desa wisata dari 62 desa di Gianyar, 30 diantaranya telah mengembangkan desa wisata. Bahkan kini akan menyusul 8 desa yang dicatat menjadi desa wisata. Dari masyarakat desa hingga pemerintah di Gianyar sudah menyadari peluang ini, sehingga banyak desa mulai ikut mencetuskan diri sebagai desa wisata. Demikian ditegaskan Putu Gede Pebriantara (anggota Komisi IV DPRD Gianyar). Kondisi ini dipandang wajar, mengingat merosotnya UKM di Gianyar akibat menurunnya penjualan barang kerajinan. Bisa dicek tamu yang sekarang datang ke Bali, dominan hanya menginap, menikmati budaya, mengunjungi tempat wisata dan kuliner.

Lebih lanjut disebutkan, bahwa dengan dibukanya desa wisata, bisa menggiring wisatawan menginap di rumah rumah warga.

Selain itu harga yang lebih terjangkau dibanding hotel, dampak dari desa wisata ini lebih dirasakan masyarakat bawah. Wisatawanpun dirasakan masyarakat bawah, dan wisatawan dipastikan lebih *enjoy*, karena mereka bisa menikmati langsung kehidupan masyarakat Bali. Apalagi tamu yang datang sekarang lebih dominan ekonomi menengah ke bawah, sehingga yang dicari pasti *home stay*. Desa Singapadu yang kini sedang dicetuskan sebagai desa wisata, mulai menyelenggarakan beberapa event berbasis budaya yang bisa menjadi daya Tarik wisatawan. Ada pula banjar Peninjaoan, Desa Batuan yang mmiliki kawasan sawah dengan panorama yang indah yang sedang dijadikan daya tarik baru, sehingga wisatawan yang berkunjung tidak hanya ke Pura Puseh Batuan, tetapi juga ke lokasi lain.

Hasil penelitian Nina Karlina dalam *Advances in Social Science, Education and Humanities Research (ASSEHR), volume 141* International Conference on Public Policy, Social Computing and Development 2017 (ICOPOSDev 2017) yang diterbitkan Atlantis Press disebutkan, bahwa: *BUMDes in Leles Sub-district Garut District aims to help the economy of its people by focusing on trade services, trade in goods, savings and loans, and management of village markets. The advantages of Joint venture-Owned Enterprises (BUMDes) Leles has been established cooperation with PT. Changsin Reksa Jaya located in the Sub-district of Leles in the procurement of catering, bureaus and services. BUMDes Together with Leles get a*

lot of praise even become a pilot of Joint venture Owned Enterprises (BUMDes). (BUMDes di Leles di Kecamatan dan Kabupaten Garut bertujuan untuk membantu perekonomian rakyatnya dengan berfokus pada layanan perdagangan, perdagangan barang, tabungan dan pinjaman, dan pengelolaan pasar desa. BUMDes Leles juga telah menjalin kerjasama dengan PT. Changsin Reksa Jaya dalam pengadaan catering, biro dan layanan, sehingga mendapat banyak pujian bahkan menjadi pilot dari BUMDes.

Desa Karangdoro memang belum ditetapkan sebagai Desa Wisata, namun dari hasil penelitian dapat dinyatakan, bahwa potensi **Sumber Daya Alam Non-Ekstraktif** seperti Pura, Candi, Sumur Tua, Beji Sakral, adalah merupakan potensi yang dapat dikelola melalui Lembaga Kemasyarakatan yang sering dikenal dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Kondisi lain yang mendukung Desa Wisata adalah sudah ada usaha penyediaan rumah penduduk yang siap disewakan untuk wisatawan yang ingin bermalam di Desa dan menyatu dengan penduduk atau warga setempat. Rumah penduduk ini dapat dipadankan dengan *Home Stay* sebagai salah satu fasilitas yang wajib dimiliki untuk menjadikan suatu desa sebagai Desa Wisata. Yang perlu ditata adalah model pengelolaannya dan fasilitasnya sesuai dengan standar *Home Stay* yaitu *International Standard*. Baik dari aspek kesehatan dan kebersihan Kamar Mandi, Kamar Tidur, Loby.

Standar ini biasanya merupakan binaan dari Dinas Pariwisata Pemerintahan Kabupaten.

1.7 Simpulan Dan Saran

Berdasarkan pada uraian tersebut di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1.7.1 Simpulan

Desa Karangdoro mempunyai Sumber Daya Alam, yaitu **Sumber Daya Alam Non-Ekstraktif** sumber air yang saat ini dimanfaatkan untuk bahan membuat air suci (*Tirta*), untuk pengobatan, *melukat* atau membersihkan diri secara spiritual atau lahir batin, tempat meditasi, atau yoga, juga ada tempat suci atau tempat ibadah seperti *Pura*, Candi. Sumber air dalam petak-petak kolam yang melimpah dan pancuran.

Pemanfaatan ekonomi di wilayah lingkungan sekitar adalah ekonomi yang menyesuaikan seluruh aktivitasnya dengan kondisi dan potensi alam setempat untuk mewujudkan kesejahteraan penghuninya sambil tetap mempertahankan keseimbangan alamiah ekosistem setempat sebagaimana menjadi inti dari prinsip pembangunan berkelanjutan. Salah satunya potensi sumber air sudah sering dikunjungi oleh umat Hindu dari luar Jawa seperti umat Hindu dari Bali. Untuk itu beberapa warga masyarakat sudah menyediakan penginapan yang dapat

dipadankan dengan *Home Stay* sesuai dengan kemampuan dan pengetahuannya.

1.7.2 Saran

Sumber daya alam non-Ekstraktif hendaknya dapat dikelola untuk dimanfaatkan sebagai pendukung penetapan Desa Wisata. Untuk mengelola sumber daya alam non-ekstraktif tersebut diharapkan ada inovasi dari warga masyarakat *pengempon Pura* yang nantinya dapat mempertahankan kesucian dan kesakralan sumber daya air, tempat suci berupa Pura dan Candi yang dapat dijadikan daya tarik tersendiri di Desa Karangdoro.

Penginapan sebagai salah satu syarat Desa Wisata yang saat ini sudah ada di beberapa rumah penduduk diharapkan memenuhi standar internasional baik mengenai aspek kesehatan, kebersihan, tata ruang, pelayanan yang diintegrasikan dengan *Sapta Pesona*. Dan badan pengelola bisnis yang di Desa diharapkan bisa berbentuk sebagai salah satu badan seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk dapat menghindari adanya persaingan secara individual, tapi sebaliknya seluruh kegiatan untuk mempersiapkan penetapan Desa Wisata sudah dilakukan dalam wadah Desa untuk kesejahteraan seluruh warga desa.

Daftar Referensi

- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 2015, "Penyusunan rencana detail Desa Wisata Kamasan", Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Klungkung.
- I Made Suwitra, I Nyoman Sukandia, 2017, "Model pengelolaan sumber daya agrarian berbasis desa wisata dan kearifan hukum lokal di Desa Paksebali Klungkung", *Laporan Penelitian*, Universitas Warmadewa, Denpasar.
- Putu Aryastana, I Gusti Agung Putu Eryani, Cok Agung Yujana, 2018, "PKM Pengelolaan Potensi Air di Pura Bukit Amerta Desa Karangdoro Kabupaten Banyuwangi", *Laporan Pengabdian*, Universitas Warmadewa.
- Maria S.W Sumardjono, Nurhasan Ismail, Ernani Rustiadi, Abdullah Aman Damai, 2014, *Pengaturan Sumber Daya Alam di Indonesia, Antara Yang Tersurat dengan Yang Tersirat Kajian Kritis Undang-Undang Terkait Penataan Ruang dan Sumber Daya Alam*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- J.B.C Field, 2001, *Natural Resource Economics an Introduction*, International Edition. McGraw-Hill Companies Inc, New York, dalam Maria S.W Sumardjono, Nurhasan Ismail, Ernani Rustiadi, Abdullah Aman Damai, 2014, *Pengaturan Sumber Daya Alam di Indonesia, Antara Yang Tersurat dengan Yang Tersirat Kajian Kritis Undang-Undang Terkait Penataan Ruang dan Sumber Daya Alam*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 2015, "Penyusunan rencana detail Desa Wisata Kamasan", Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Klungkung.
- Bali Post, 2017, "Membangun Desa Wisata, harus punya keunikan, perbaiki infrastruktur", Minggu 5 Pebruari.
- Bali Post, 2018, "CEO World Bank kunjungi Tukad Bindu Kesiman", 10 Oktober.
- I Made Suwitra, 2009, "Eksistensi Hak Penguasaan dan Pemilikan atas Tanah Adat di Bali dalam Perspektif Hukum Agraria Nasional", *Disertasi*, Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
- I Made Suwitra, I Made Minggu Widyantara, I Nyoman Sujana, 2012, "Dampak pendaftaran hak atas tanah adat di Bali (studi kasus di Desa Adat Culik Karangasem)", *Laporan Penelitian*, Hibah Dikti, Universitas Warmadewa.
- I Made Suwitra, I Nyoman Sukandia, 2017, "Model Pengelolaan Sumber Daya Agraria Berbasis Desa Wisata dan Kearifan Hukum Lokal di Desa Paksebali Klungkung", *Laporan Penelitian*, Hibah Institusi 2017.
- I Made Suwitra, I Made Minggu Widyantara, I Nyoman Sujana, 2015, "Model Penguasaan Tanah Pauman Untuk Kesejahteraan Krama Pauman di Kabupaten Karangasem", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, ISSN 0215 9687, Daring 2503-1465, Tahun ke-46 N0.4 Desember 2016, hal. 498.

Nuryani Wiendu, 1993, "Concept, perspective and challangs", makalah, diakses tanggal 21 Desember 2017.

Nina Karlina, 2017, *Advances in Social Science, Education and Humanities Research (ASSEHR), volume 141*, International Conference on Public Policy, Social Computing and

Development 2017 (ICOPOSDev 2017), Atlantis Press.

Amelia Sri Kusuma Dewi, 2014, "Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai upaya dalam meningkatkan pendapatan asli desa (PADes) serta menumbuhkan perekonomian desa", *Journal of Rural and Development*, Volume V No. 1 Februari 2014, hal. 1-13.